

## **Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SILPA terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan**

**Mila Amelia\*, Periansya**

Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya<sup>1</sup>

\*Correspondence email: milaaameliaa09@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SILPA baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Modal. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan adalah dokumentasi sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (2) SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (3) Desentralisasi Fiskal dan SILPA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji determinasi diketahui  $R^2$  sebesar 26%. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Desentralisasi Fiskal dan SILPA sebesar 26%, sedangkan sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Belanja Modal; Desentralisasi Fiskal; SILPA.

**Abstract.** This study aims to determine the effect of Fiscal Decentralization and SILPA either partially or simultaneously on Capital Expenditures. This type of research is quantitative research. The sample used as many as 17 districts / cities in the province of South Sumatra. The type of data used is documentation so that the data obtained is secondary data. The data analysis method used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) Fiscal Decentralization has a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) SILPA has a positive and significant effect on Capital Expenditures (3) Fiscal Decentralization and SILPA simultaneously have a positive and significant effect on Capital Expenditures. The result of the determination test is known that  $R^2$  is 26%. These results can be concluded that Capital Expenditure is influenced by Fiscal Decentralization and SILPA by 26%, while the remaining 74% is influenced by other factors not examined in this study.

**Keywords:** Capital Expenditure; Fiscal Decentralization; SILPA.

### **PENDAHULUAN**

Besaran perkembangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber penerimaan dan pengeluaran yang berbeda dimana kondisi posisi wilayah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan berpengaruh terhadap implementasi pelaksanaan desentralisasi di tiap daerah. Belum meratanya keuangan tiap daerah di Indonesia mendorong terhambatnya pembangunan yang merata, oleh karena itu pemerintah pusat berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan dibuatnya kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan di tiap daerah untuk dapat mengatasi kesenjangan fiskal.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, *furniture*, software dan sebagainya. (Firdha Chairama, 2020). Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pengalokasian belanja modal yang baik merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Namun kenyataannya, permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemerintah daerah masih lebih banyak menggunakan pendapatan daerahnya untuk keperluan belanja pegawai yang bisa dikatakan kurang produktif daripada digunakan untuk belanja modal. Hal ini menjadi fenomena bagi pemerintah daerah baik pusat maupun daerah. Dan penyerapan anggaran ini mengakibatkan tidak optimalnya alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dikutip dari iNews.id, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumsel Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan untuk meminta Pemprov. Sumatera Selatan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tidak mengandalkan dana transfer pusat. Kemendagri juga menyorot tren belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. (sumsel.inews.id, 2021).

Belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata setiap tahunnya belanja modal di bawah 30%, yaitu lebih rendah daripada belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Hanya kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara yang mencapai pengalokasian lebih dari 30%. Hal ini artinya banyak daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang belum memenuhi target dalam tahun 2016-2020 dimana secara keseluruhan belanja modal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) sekurang-kurangnya adalah 30% dari belanja daerah (sesuai dengan Permendagri No.27/2013). Faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu desentralisasi fiskal dimana daerah tersebut bisa mengelola sendiri pendapatan asli daerahnya dengan baik. Anggaran belanja sangat terkait dengan penerimaan pendapatan daerah, sehingga dalam melakukan belanja daerah maka porsi pendapatan daerah lebih dominan membiayai agar tercipta kemandirian daerah. Provinsi Sumatera Selatan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah, dikarenakan rata-rata rasio derajat desentralisasi belum mencapai 50%. Hal ini berarti dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dan hal ini tentu berpengaruh dalam hal pembangunan infrastruktur pembiayaan pembangunan daerah disetiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Faktor lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. Anggaran pembiayaan daerah yang berasal dari SILPA digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya dapat membiayai perencanaan berikutnya oleh kewajiban belanja langsung, diantaranya belanja jasa dan barang, belanja pegawai dan juga belanja modal. Fenomena yang terjadi adalah tingginya SILPA di Provinsi Sumatera Selatan. SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana anggaran. Kasus di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatnya SILPA tetapi tidak diikuti meningkatnya belanja modal atau dengan kata lain realisasi belanja modal mengalami penurunan.

Pada penelitian Santika Rahya (2019) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Menurut Annisa Wahyu Hikmah (2019) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dari fenomena penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan SILPA terhadap belanja modal. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan SILPA terhadap belanja modal.

### *Literature Review*

#### *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Teori keagenan digagas Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menjelaskan mengenai kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh pihak yang terlibat seperti pihak agen dan pihak prinsipal. Keterlibatan antara dua pihak di suatu entitas yang saling berhubungan pada pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada pihak agen melalui suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Einsenhardt (1989) melanjutkan penelitian tentang teori keagenan yang telah dilakukan oleh Jensen dan Meckling dengan judul *theory: an assessment and review*.

Keterkaitan antara pihak agen dan pihak prinsipal disuatu entitas yaitu ketika manajemen bertindak selaku pihak agen dan investor bertindak selaku pihak principal. Pihak agen adalah pihak yang diamanatkan dan diberi tanggungjawab dalam mengambil keputusan bisnis sedangkan pihak prinsipal adalah pihak yang mengamanatkan tanggung jawab kepada pihak agen. Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yakni keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bertindak selaku agen. Pemerintah pusat melakukan transfer kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah mengenai penyediaan pelayanan publik. Hubungan keagenan tersebut ialah pemerintah daerah selaku pihak agen bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat selaku pihak prinsipal.

#### *Belanja Modal*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional.

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan sebagian tanggung jawab fiskal atau keuangan Negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten atau kota). Sedangkan menurut Saragih (2017) dalam buku Rudi Badrudin menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang (tanggungjawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangan daerahnya guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional.

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Secara umum SILPA dapat disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan dimasukkan ke tahun anggaran berikutnya).

### METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini akan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020 (5 tahun). Teknik pengumpulan data yakni tahapan proses yang sangat krusial di dalam penelitian dalam memperoleh data. Penelitian ini mengambil data sekunder untuk diamati. Menurut Fauzi et.al., 2019, statistik deskriptif sangat penting karena dapat menggambarkan data secara keseluruhan sehingga hasil analisis dapat menunjang penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Keterangan: a = Konstanta; b = Koefisien Regresi; Y = Belanja Modal;  $X_1$  = Desentralisasi Fiskal;  $X_2$  = SILPA; e = error

### HASIL

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**

		<b>Unstandardized Residual</b>
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44573127
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.042
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

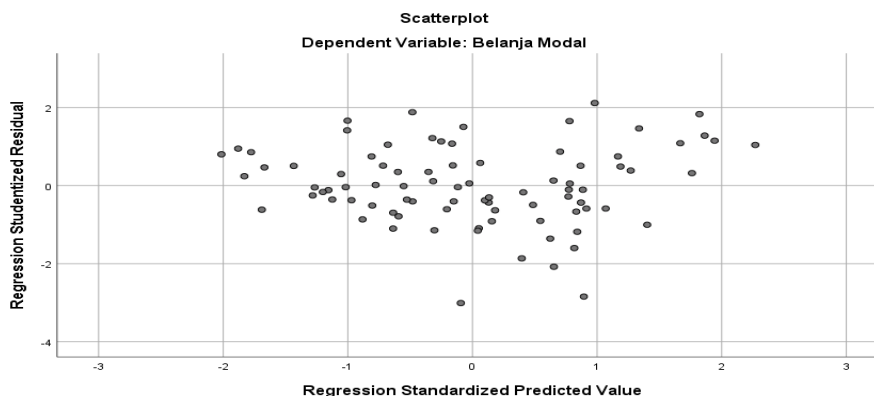
Sumber: data olahan

Tabel 1 diketahui nilai signifikan data adalah 0,200 dan nilai signifikan alpha senilai 0,05. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikan data penelitian senilai 0,200 lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikan alpha senilai 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan Tabel 2 diperoleh jika nilai VIF variabel Desentralisasi Fiskal dan SILPA senilai 1,034. Dimana semua variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Kemudian nilai *Tolerance* variabel Desentralisasi Fiskal dan SILPA senilai 0,967 yang mempunyai nilai *Tolerance* lebih dari 0,100 menjelaskan bahwa data penelitian tidak terbukti ditemukannya gejala multikolinearitas pada model regresi.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Desentralisasi Fiskal	.967	1.034
	SILPA	.967	1.034

Sumber: data olahan



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Scatterplot**

Gambar 1 dihasilkan jika tidak ditemukannya pola pada grafik hasil uji *scatterplot* dan titik-titik berada menyebar di atas maupun di bawah titik nol (0) pada sumbu Y, menjelaskan bahwa tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas pada data penelitian.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.509 <sup>a</sup>	.260	.241	135412.46944	1.764

Sumber: data olahan

Tabel 3 diketahui jika nilai Durbin-Watson (DW) senilai 1,764, DU senilai 1,6957, DL senilai 1,5995, 4 - DU senilai 2,3043, dan 4 - DL senilai 2,4005 . Jadi diperoleh bahwa  $DU < DW < 4 - DU$  dan atau jika diterjemahkan berdasarkan angka yakni  $1,6957 < 1,764 < 2,3043$  yang artinya tidak terbukti jika terjadinya gejala autokorelasi pada data penelitian. Tabel 3 juga mengungkapkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk pengujian variabel independen terhadap variabel diperoleh jika nilai *R Square* senilai 0,260 yang artinya jika 26% pengaruh Belanja Modal diuraikan oleh variabel independen berupa Desentralisasi Fiskal dan SILPA. Dimana sisanya senilai 74,% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan Tabel 4 hasil uji analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 24,140 + 0,235X_1 + 0,082X_2 + e$$

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	24.140	.779			30.974	.000
	Desentralisasi Fiskal	.235	.099	.244		2.362	.021
	SILPA	.082	.032	.263		2.540	.013

Sumber: data olahan

Tabel 4 juga menjelaskan bahwa hasil uji hipotesis pengaruh parsial diperoleh nilai t tabel senilai 1,98932, dan nilai t hitung Desentralisasi Fiskal senilai 2,362 dengan nilai signifikan senilai 0,021, nilai t hitung SILPA yang bernilai 2,540 dengan nilai signifikan senilai 0,013. Nilai koefisien regresi Desentralisasi Fiskal dan SILPA  $>0.05$

yang mengindikasikan jika terdapat pengaruh yang positif Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui nilai signifikansi variabel desentralisasi fiskal senilai 0,021 kurang dari nilai signifikansi alpha ( $\alpha$ ) senilai 0,05, nilai t hitung senilai 2,362 lebih besar dari nilai t tabel senilai 1,98932 dan memiliki nilai koefisien regresi desentralisasi fiskal senilai 0,235 yang menunjukkan jika  $H_0$  tidak diterima dan  $H_1$  diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan positif signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah kab/kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh secara parsial variabel SILPA terhadap Belanja Modal diketahui nilai signifikan senilai 0,013, nilai t hitung senilai 2,540, nilai t tabel senilai 1,98932 dan nilai signifikansi alpha ( $\alpha$ ) senilai 5% dan atau 0,05. Maka diperoleh jika nilai signifikansi senilai 0,013 lebih kecil dari nilai signifikansi alpha ( $\alpha$ ) senilai 0,05 dan nilai t hitung senilai 2,540 kurang dari nilai t tabel senilai 1,98932 yang artinya SILPA memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien regresi SILPA senilai 0,082 yang mengindikasikan jika terdapat pengaruh yang positif SILPA terhadap Belanja Modal. Penelitian Santika Rahya (2019) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan diperoleh nilai F hitung pada variabel Desentralisasi Fiskal dan SILPA senilai 7,351 dengan nilai signifikansi 0,001 dan nilai F tabel senilai 3,11. Sehingga diperoleh jika nilai signifikansi senilai 0,001 yang kurang dari signifikansi alpha ( $\alpha$ ) senilai 0,05 dan nilai F hitung senilai 7,351 yang lebih besar dari F tabel senilai 3,11 menjelaskan adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen berupa Desentralisasi Fiskal dan SILPA secara bersamaan terhadap variabel dependen berupa Belanja Modal.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.992	2	1.496	7.351	.001 <sup>b</sup>
	Residual	16.689	82	.204		
	Total	19.681	84			

Sumber: data olahan

Tabel 5 diperoleh nilai F hitung pada variabel Desentralisasi Fiskal dan SILPA senilai 7,351 dengan nilai signifikansi 0,001 dan nilai F tabel senilai 3,11. Sehingga diperoleh jika nilai signifikansi senilai 0,001 yang kurang dari signifikansi alpha ( $\alpha$ ) senilai 0,05 dan nilai F hitung senilai 7,351 yang lebih besar dari F tabel senilai 3,11 menjelaskan adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen berupa Desentralisasi Fiskal dan SILPA secara bersamaan terhadap variabel dependen berupa Belanja Modal.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu sumber penerimaan daerah khususnya untuk pembangunan pelayanan publik. SILPA memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. SILPA dan Belanja Modal memiliki hubungan yang berbanding lurus. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena SILPA merupakan salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan daerah. Desentralisasi Fiskal dan SILPA secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan signifikan sebesar 26% terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Wahyu Hikmah, 2019, Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), luas wilayah dan kinerja keuangan terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Bachelor*, Universitas Widya Dharma.
- Badrudin, Rudi. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Chairama, Firdha, 2020, Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Einsenhart, 1989, *Theory: An Assessment and Review*.

- Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran,
- Rahayu, Santika, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Luas Wilayah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Pengalokasian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah